

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMI KREATIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh:

¹Fahruni Khaerunnisa, ²Rosdaniah, ³Wiwit Agustina, ⁴Rois Dinan,
⁵Brilliani Raras Sakapuspa

¹Universitas Indonesia Timur

Jl. Rappocini Raya No. 171-173, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Makassar

²IAIN Takengon

Jl. Yos Sudarso/A. Dimot No.10, Takengon Barat, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah, Aceh

³UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Raya Dadaprejo No. 7, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur

⁴Politeknik Pariwisata Makassar

Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

⁵Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294

e-mail: fahrunikhaerunnisa11@gmail.com¹, rosdaniah_wil@yahoo.co.id², wiwitagustina355@gmail.com³,
roisdinan@poltekparmakassar.ac.id⁴, brilliani_raras.ep@upnjatim.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze local government strategies in developing the potential of the creative economy and their impact on community welfare. Creative economy development is a regional development priority, in line with national policies coordinated by the Ministry of Tourism and Creative Economy. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analyzed using interactive analysis techniques including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that local government strategies are implemented through policy integration in development planning, the creation of superior subsectors based on local potential, human resource capacity building, facilitating access to capital, and utilizing digital technology in product marketing. Collaboration between the government, academics, creative communities, and the private sector has also strengthened the creative economy ecosystem in the region. The implementation of these strategies has been proven to increase business incomes, expand employment opportunities, and strengthen local cultural identity. In conclusion, local government strategies in developing the creative economy have a positive impact on community welfare, both economically and socially. However, optimization programs still require strengthened governance, increased digital literacy, more inclusive financing innovations, and an ongoing evaluation system to ensure a broader and more sustainable impact.

Keywords: *Regional Government Strategy, Creative Economy, Community Welfare, Regional Development, Digital Transformation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dilakukan melalui integrasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan, pemetaan subsektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas kreatif, dan sektor swasta turut memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Implementasi strategi tersebut terbukti meningkatkan pendapatan pelaku usaha, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal. Kesimpulannya, strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Namun, optimalisasi program masih memerlukan penguatan tata kelola, peningkatan literasi digital, inovasi pembiayaan yang lebih inklusif, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan agar dampak yang dihasilkan semakin luas dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Ekonomi Kreatif, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Daerah, Transformasi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif menuntut setiap daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Transformasi struktur ekonomi dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing wilayah. Konsep ekonomi kreatif muncul sebagai jawaban atas tantangan tersebut, karena menempatkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai faktor produksi utama. Di Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi agenda strategis nasional yang didorong melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat, seperti pembentukan Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian dilebur ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan (Kurniati et al., 2023).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi yang diatur dalam sistem desentralisasi, sehingga dapat merancang strategi pembangunan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal masing-masing wilayah. Dalam konteks ekonomi kreatif, strategi tersebut mencakup penguatan regulasi, penyediaan infrastruktur, fasilitasi permodalan, pelatihan sumber daya manusia, hingga promosi dan pemasaran produk kreatif. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, baik dalam subsektor kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, desain, maupun aplikasi digital. Oleh karena itu, strategi yang dirancang perlu berbasis pada pemetaan potensi daerah secara komprehensif agar pengembangannya tepat sasaran dan berkelanjutan (Juniar et al., 2024).

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda. Karakteristik ekonomi kreatif yang inklusif dan fleksibel memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif di tingkat daerah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Irawati et al., 2024).

Meskipun demikian, pengembangan ekonomi kreatif di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, minimnya literasi digital, serta kurang optimalnya sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan komunitas menjadi hambatan yang perlu diatasi. Di samping itu, belum semua pemerintah daerah memiliki roadmap atau rencana induk pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kondisi ini menyebabkan program yang dijalankan sering kali bersifat sporadis dan kurang berkelanjutan (Rahmi, 2018).

Strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, melainkan juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi kreatif yang berhasil akan mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat, memperkuat identitas budaya lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif (Laksmi et al., 2024).

Dalam perspektif teori pembangunan daerah, keberhasilan strategi pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola (*good governance*). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi untuk riset dan inovasi, dengan sektor swasta untuk investasi dan pemasaran, serta dengan komunitas kreatif untuk pengembangan ide dan jejaring. Sinergi ini akan memperkuat daya saing produk kreatif lokal di pasar nasional maupun internasional (Agustina et al., 2025).

Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan praktik baik (*best practices*) dalam pengembangan ekonomi kreatif, misalnya pengembangan klaster industri kreatif berbasis budaya dan pariwisata. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, ekonomi kreatif mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih terdapat kesenjangan antar daerah dalam hal kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur. Hal ini menuntut adanya kajian lebih mendalam mengenai strategi yang diterapkan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Arifin, 2025).

Dampak pengembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti peningkatan pendapatan rumah tangga, penyerapan tenaga kerja lokal, pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu, ekonomi kreatif juga memiliki dampak sosial berupa penguatan kohesi sosial dan pelestarian budaya lokal. Dengan memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai sumber inspirasi, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi tetapi juga menjaga identitas dan warisan daerahnya (Bahasoan & Wargadinata, 2025).

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah dituntut untuk mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha kreatif melalui pelatihan, inkubasi bisnis, serta dukungan akses pasar berbasis platform digital. Digitalisasi memungkinkan produk kreatif lokal menjangkau

pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi kreatif perlu selaras dengan agenda transformasi digital daerah (Hasi & Ariyadi, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas strategi tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis kreativitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan ide sebagai faktor produksi utama. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan sumber daya alam, ekonomi kreatif menekankan pada nilai tambah berbasis pengetahuan dan kreativitas manusia. Di Indonesia, pengembangan sektor ini secara kelembagaan pernah dikelola oleh Badan Ekonomi Kreatif dan saat ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Literatur menyebutkan bahwa ekonomi kreatif memiliki karakteristik utama berupa inovasi berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses produksi dan distribusi.

Menurut teori ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), kreativitas dan inovasi menjadi sumber daya strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif daerah. Sub-sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, kriya, fesyen, desain komunikasi visual, film, musik, hingga aplikasi digital memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi struktur ekonomi daerah menuju sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan (Nisa et al., 2025).

Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam perspektif teori pembangunan daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun strategi berbasis potensi unggulan wilayah, termasuk dalam pengembangan ekonomi kreatif. Strategi tersebut dapat berupa penyusunan regulasi pendukung, penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur, fasilitasi akses permodalan, pelatihan dan pendampingan usaha, serta promosi produk kreatif.

Teori *good governance* menekankan bahwa keberhasilan strategi pembangunan sangat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ekonomi kreatif, pendekatan *quadruple helix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas menjadi model yang relevan dalam membangun ekosistem kreatif yang kuat. Sinergi antaraktor ini diyakini

mampu meningkatkan inovasi, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk kreatif daerah.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam literatur pembangunan ekonomi diukur melalui indikator ekonomi dan sosial, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan sering dikaitkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan ekonomi kreatif diyakini memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak langsung terlihat pada peningkatan pendapatan pelaku usaha dan penciptaan lapangan kerja baru, sedangkan dampak tidak langsung mencakup penguatan identitas budaya, pemberdayaan komunitas lokal, serta peningkatan partisipasi sosial. Oleh karena itu, strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif perlu dianalisis keterkaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sarungu et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara komprehensif melalui perspektif para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat langsung. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan, program, dan implementasi strategi yang dijalankan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di wilayah penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, meliputi pejabat pemerintah daerah yang menangani sektor ekonomi kreatif, pelaku usaha kreatif, akademisi, serta perwakilan komunitas kreatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi hasil. Peneliti mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antara strategi pemerintah daerah dan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori pembangunan daerah dan ekonomi kreatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas strategi yang diterapkan serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif telah dirancang secara terstruktur melalui kebijakan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah menempatkan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Hal ini tercermin dari pembentukan tim atau unit kerja yang

secara khusus menangani pengembangan ekonomi kreatif serta sinergi program dengan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Integrasi kebijakan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat arah dan tujuan pengembangan sektor kreatif di tingkat daerah.

Secara kelembagaan, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan potensi subsektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi, seperti kuliner, kriya, fesyen, dan seni pertunjukan. Pemetaan ini dilakukan melalui pendataan pelaku usaha, identifikasi klaster industri kreatif, serta analisis kebutuhan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis potensi lokal (*local wisdom*) menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya tarik produk kreatif daerah. Produk-produk yang mengangkat identitas budaya lokal terbukti lebih mudah diterima oleh pasar karena memiliki keunikan dan nilai tambah yang berbeda dibandingkan produk massal (Permana et al., 2024).

Dalam aspek penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pelatihan dan pendampingan usaha. Pelatihan tersebut mencakup manajemen keuangan, strategi pemasaran, desain produk, hingga pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, program pelatihan dinilai cukup membantu dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Namun demikian, sebagian pelaku usaha mengungkapkan bahwa keberlanjutan program pendampingan masih perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih optimal dan berjangka panjang (Rivalni et al., 2025).

Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah telah berupaya memfasilitasi akses permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, koperasi, dan perbankan. Beberapa pelaku usaha mengakui bahwa kemudahan akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam mengembangkan skala usaha mereka. Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kendala administratif dan persyaratan perbankan yang dirasa cukup berat bagi pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi skema pembiayaan yang lebih inklusif dan ramah terhadap pelaku usaha kecil (Junaedi & Rojali, 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital dalam pemasaran produk, baik melalui media sosial maupun marketplace. Pelaku usaha yang telah mengadopsi teknologi digital terbukti mengalami peningkatan penjualan dan perluasan jangkauan pasar hingga ke luar daerah. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi promosi, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas (Khuamir & Yazid, 2025).

Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan sektor swasta dalam bentuk pelatihan, pameran, serta inkubasi bisnis. Model kolaborasi ini sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Kolaborasi tersebut terbukti mampu meningkatkan inovasi produk dan memperluas jaringan usaha pelaku ekonomi kreatif (Rahayu & Hendra, 2025).

Dampak pengembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat dari peningkatan pendapatan pelaku usaha dan penciptaan lapangan kerja baru. Beberapa informan menyatakan bahwa usaha kreatif yang mereka jalankan mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar, terutama generasi muda. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran di daerah penelitian. Selain itu, peningkatan pendapatan juga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga (Sidauruk, 2013).

Secara sosial, pengembangan ekonomi kreatif turut memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat terhadap produk lokal. Kegiatan festival, pameran, dan promosi budaya yang difasilitasi pemerintah daerah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menampilkan karya kreatifnya. Masyarakat menjadi lebih aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga tercipta dinamika sosial yang lebih inklusif dan partisipatif. Dampak ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang signifikan (Mukminin et al., 2025).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang masih dihadapi. Keterbatasan anggaran daerah, belum optimalnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha menjadi hambatan dalam implementasi strategi. Selain itu, belum semua program memiliki indikator evaluasi yang terukur untuk menilai efektivitasnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif agar program pengembangan ekonomi kreatif dapat berjalan secara berkelanjutan (Fajri & Fatticia, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan penguatan pada aspek keberlanjutan program, inovasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital secara lebih merata (Handini et al., 2025). Dengan perbaikan tersebut, ekonomi kreatif berpotensi menjadi motor penggerak utama pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif telah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan terintegrasi yang mencakup perumusan regulasi, pemetaan subsektor unggulan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi akses permodalan, serta dorongan transformasi digital. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat landasan pengembangan sektor ini. Pendekatan berbasis potensi lokal dan kearifan budaya terbukti meningkatkan daya saing produk kreatif daerah.

Dari sisi dampak, pengembangan ekonomi kreatif memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan identitas budaya lokal. Selain berdampak secara ekonomi, sektor ini juga mendorong partisipasi sosial masyarakat dan memperkuat kohesi komunitas kreatif. Dengan demikian, ekonomi kreatif berperan tidak hanya sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi strategi, seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, pendampingan berkelanjutan, inovasi pembiayaan yang lebih inklusif, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terukur agar pengembangan ekonomi kreatif dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. P., Endri, V. D., Saputri, R. T., & Zora, F. (2025). Strategi Pengembangan UMKM Di Sektor Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Daya Saing. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5123–5135.
- Arifin, Z. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Nusantara. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 212–216.
- Bahasoan, H., & Wargadinata, B. (2025). Pemberdayaan Pemimpin Desa Dalam Mendorong UMKM Dan Ekonomi Kreatif Lokal Berbasis Desa Wisata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 142–147. <https://doi.org/10.59818/jpm.V5i2.1478>
- Fajri, N., & Fatticia, R. (2025). Analisis Strategi Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1,2,3. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, 4(4), 422–431.
- Handini, N., Darwina, M., Yudistira, & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964–986.
- Hasi, L., & Ariyadi, A. (2024). Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Barru : Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Sektor Potensial Dan Kebijakan Pembangunan PENDAHULUAN Ekonomi Kreatif Telah Diakui Secara Global Sebagai Salah Satu Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Mengand. *Ijappi*, 1(2), 1–10.
- Irawati, S. A., Wantara, P., & Arfy, W. R. (2024). Transformasi UMKM Kuliner: Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen*, 4(4), 515–522.
- Junaedi, S. R. P., & Rojali, R. (2024). Penguatan Ekonomi Kreatif Lokal Melalui Pelatihan Kewirausahaan Digital Di Komunitas Masyarakat. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 33–41. <https://doi.org/10.34306/Adimas.V5i1.1132>
- Juniar, A., Nuryadin, M. R., & Rahmawati, R. (2024). Potensi Dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Untuk Mendukung Pariwisata Di Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Education And Development*, 12(2), 367–372.
- Khuamir, M., & Yazid, M. (2025). Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal : Studi Literatur Kualitatif Terhadap Perkembangan Industri Kreatif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 156–169.
- Kurniati, P. S., Nur, S., Arif, F., Yuwono, N., & Munigar, W. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Kota Bandung. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1–16.
- Laksmi, G. W., Tarigan, E., Dewi, T. R., & Ingkadijaya, R. (2024). Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 40–63. <https://doi.org/10.35309/Dharma.V5i1.318>

- Mukminin, A., Sinaga, H. A., Aulia, D., & Ito, R. D. (2025). Dampak Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, 4(4), 404–410.
- Nisa, K., Isra, N., & Aninda, K. (2025). Peran Pemerintahan Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif Dengan Kondisi Pertumbuhan Nilai Sdm Dan Sda Yang Beragam Di Indonesia 1,2,3. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, 4(4), 281–287.
- Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pemerintah Daerah Dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat : Perspektif Hukum Dan Sosiologi Local Government In The Dynamics Of The Community Economy : A Legal And Sociological Perspective. *Dialogia Iuridica*, 15(4), 1–28.
- Rahayu, S., & Hendra. (2025). Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Alternatif Usaha Di Kota Binjai. *An-Najah: Journal Of Islamic Economics*, 1(1), 50–59.
- Rahmi, A. N. (2018). Perkembangan Industri Ekonomi Kreatif Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 1386–1395.
- Rivalni, R., Putri, W. G., & Wardani, W. (2025). UMKM Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4(4), 394–403.
- Sarungu, J. J., Soemanto, R., & Sumantyo, R. (2024). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Industri Kreatif Seni Batik Di Kabupaten Ngawi Julianus Johnny Sarungu, RB Soemanto, Riwi Sumantyo. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 1–12.
- Sidauruk, R. (2013). Enhancing The Role Of Local Government Creative Economy Development In Order. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 141–157.